

Ringkasan Eksekutif: Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi

Pandemi COVID-19 dan tindakan pencegahannya memicu resesi global terdalam dalam delapan dekade. Karantina wilayah (*lockdown*) yang dilakukan banyak negara dan pembatasan perjalanan menyebabkan permintaan global untuk barang dan jasa turun drastis, seiring dengan dengan anjloknya arus pariwisata dan harga komoditas; rantai pasokan terganggu; dan volatilitas pasar keuangan meningkat. Pemerintah Indonesia juga menerapkan pembatasan pergerakan (*mobility*) dari pertengahan bulan Maret dan kemudian karantina wilayah sebagian dari bulan April hingga Juni, membuat banyak perusahaan dan toko berhenti beroperasi, dan konsumen enggan untuk berbelanja.

Terpukul oleh guncangan eksternal dan domestik yang parah, aktivitas ekonomi jatuh. Pertumbuhan PDB riil melemah dari 5,0 persen yoy di kuartal-4 tahun 2019 menjadi 3,0 persen pada kuartal-1 tahun 2020, terendah sejak tahun 2001 (Gambar ES.1). Konsumsi swasta melambat karena adanya pembatasan mobilitas dan perilaku konsumen enggan keluar rumah sehingga membatasi konsumsi. Pertumbuhan investasi juga menurun dengan meningkatnya ketidakpastian dan harga komoditas yang lebih rendah. Perlambatan pertumbuhan ini juga terlihat hampir diseluruh sektor ekonomi. Sektor manufaktur, konstruksi, dan sektor jasa bernilai tambah rendah termasuk transportasi, pergudangan, hotel, dan restoran, serta sektor yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar, semuanya mengalami penurunan sebesar hampir separuhnya dibandingkan pertumbuhan kuartal-4 tahun 2019. Sebaliknya, pertumbuhan sektor jasa yang sarat pengetahuan modern, termasuk layanan digital, keuangan, pendidikan dan kesehatan mengalami percepatan.

Melambatnya permintaan dalam negeri dan beberapa ekspor barang manufaktur membantu penurunan defisit neraca transaksi berjalan (*Current Account Deficit*, CAD) menjadi 2,5 persen dari PDB di Q1 tahun 2020 dari 2,7 persen dari PDB di Q4 tahun 2019 (rata-rata bergerak empat kuartal; Gambar ES.2). Surplus perdagangan barang melonjak, karena beberapa pengalihan produksi barang manufaktur dari Tiongkok dan harga minyak kelapa sawit yang lebih tinggi di awal tahun yang menopang nilai ekspor. Sementara itu, impor mengalami kontraksi karena konsumsi dan investasi yang lebih rendah, serta menurunnya harga minyak. Dengan adanya hambatan bepergian (*travel restrictions*) dan transportasi global secara mendadak, ekspor dan impor jasa berkontraksi secara signifikan.

Di tengah volatilitas keuangan global, arus keluar portofolio yang tajam dan secara mendadak, yang lebih besar dibandingkan Krisis Keuangan Global (*Global Financial Crisis*) dan Krisis Keuangan Asia (*Asian Financial Crisis*) mengakibatkan neraca transaksi finansial mengalami defisit kuartalan pertama sejak tahun 2011 (Gambar ES.3). Akibatnya, imbal hasil obligasi pemerintah meningkat 57 basis poin dan Rupiah terdepresiasi sebesar 17,7 persen di kuartal-1. Meskipun CAD lebih kecil, defisit neraca transaksi finansial yang lebih besar menyebabkan defisit Neraca Pembayaran secara keseluruhan dan cadangan internasional turun menjadi USD 121,0 miliar di akhir bulan Maret.

Menyusul pelonggaran secara besar-besaran oleh bank-bank sentral secara global, kondisi likuiditas eksternal membaik secara signifikan di triwulan kedua, yang menyebabkan Rupiah menguat dan imbal hasil obligasi turun. Pelonggaran global ini, bersamaan dengan tingkat inflasi yang rendah (Gambar ES.4), memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga kebijakan secara kumulatif sebesar 50 bps di kuartal-1.

Untuk mengurangi dampak ekonomi COVID, Pemerintah telah mengumumkan stimulus fiskal sebesar Rp 695,2 triliun, dengan dampak keseluruhan terhadap anggaran yang diperkirakan sebesar 4,3 persen dari PDB, termasuk pengeluaran baru sebesar 3,0 persen dari PDB. Seiring dengan penerimaan yang lebih rendah, defisit fiskal diperkirakan akan melebar ke 6,3 persen dari PDB. Stimulus ini mencakup alokasi yang lebih besar untuk sektor kesehatan, peningkatan bantuan sosial, insentif pajak yang besar untuk korporasi, dana talangan bagi BUMN, program kredit untuk UKM dan suntikan modal untuk bank yang melakukan restrukturisasi terhadap pinjaman UKM, serta pengeluaran tambahan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Dampak COVID-19 sangat terasa di hampir seluruh mata pencaharian, seperti misalnya pekerja di sektor-sektor transportasi dan konstruksi yang melaporkan terjadinya penurunan besar dalam pendapatan. Tanpa adanya langkah-langkah untuk mengurangi guncangan ekonomi tersebut, pandemi ini akan dapat menyebabkan kemiskinan meningkat sebesar 2,0 poin persentase. Oleh karena itu peningkatan yang signifikan dalam belanja bantuan sosial menjadi sangat penting: jika ditargetkan dengan tepat dan sepenuhnya dicairkan dengan kebocoran minimal, paket tersebut akan secara signifikan mengurangi dampak pandemi terhadap kemiskinan.

Tabel ES.1: Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan turun ke nol persen pada tahun 2020 karena krisis COVID-19 berdampak pada permintaan dan penawaran domestik dan luar negeri

		2019	2020	2021	2022
PDB riil	(Perubahan persentase tahunan)	5,0	0,0	4,8	6,0
Indeks harga konsumen	(Perubahan persentase tahunan)	2,8	2,6	2,8	3,0
Neraca transaksi berjalan	(Persen dari PDB)	-2,7	-1,9	-2,0	-2,1
Neraca anggaran pemerintah	(Persen dari PDB)	-2,2	-6,3	-4,1	-3,1

Sumber: Bank Indonesia; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia
 Catatan: 2020-2022 merupakan angka perkiraan dan estimasi

Walaupun terdapat kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif, guncangan ekonomi ini, baik domestik dan eksternal akan bisa hilang secara bertahap. PDB riil Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tidak akan berubah dari tahun 2019 (Tabel ES.1). Konsumsi swasta diperkirakan melambat tajam dan investasi akan mengalami kontraksi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah akan meningkat, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengimbangi pelemahan komponen permintaan dalam negeri lainnya. Volume ekspor dan impor diproyeksikan merosot akibat kondisi eksternal yang buruk, dengan impor yang diproyeksikan menyusut dalam oleh karena permintaan dalam negeri yang melemah tajam. Oleh karena itu, ekspor bersih diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan riil secara keseluruhan.

Proyeksi pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan pulih selama dua tahun ke depan, dengan asumsi bahwa ekonomi akan dibuka kembali secara bertahap dan stabil. Konsumsi swasta diperkirakan pulih lebih cepat, diikuti oleh investasi sektor swasta. PDB riil diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada tahun 2021 yang ditunjang oleh pemulihan konsumsi swasta. PDB diperkirakan tumbuh 6,0 persen pada tahun 2022 karena pertumbuhan investasi yang tinggi dan rendahnya basis PDB (*base effect*) di tahun-tahun sebelumnya.

Proyeksi dasar ini mengasumsikan bahwa PDB global akan mengalami kontraksi sebesar sekitar 5,2 persen tahun

ini,¹ dan bahwa Pemerintah akan melonggarkan pembatasan mobilitas sebagaimana diumumkan dalam lima tahap hingga bulan Juni dan Juli, dengan perekonomian yang sepenuhnya dibuka pada bulan Agustus. Namun terdapat risiko penurunan pertumbuhan yang signifikan. Jika terjadi lonjakan kasus positif dan gelombang kedua (dari COVID-19), yang mengharuskan adanya perpanjangan atau penerapan kembali karantina wilayah sebagian, maka konsumsi swasta dan investasi akan lebih melambat dan mengalami kontraksi lebih dalam. Sementara itu, jika kondisi eksternal juga memburuk dan perekonomian global tergelincir ke dalam resesi yang lebih parah di mana PDB riil dunia menyusut 7,8 persen pada tahun 2020,² maka investasi dan ekspor akan semakin terpuak. Dalam skenario seperti itu, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2 persen pada tahun 2020.

Krisis ganda antara kesehatan masyarakat dan ekonomi ini telah menghadapkan Pemerintah pada tantangan-tantangan baru, dan di saat yang sama memperburuk tantangan-tantangan yang sudah ada. Di saat Indonesia siap melangkah ke depan, ada kebutuhan untuk merawat orang sakit dan menahan lonjakan infeksi sambil mengurangi dampak dari guncangan ekonomi dan untuk pemulihan ekonomi yang cepat dan sepenuhnya.

Oleh karena itu, fokus Prospek Perekonomian Indonesia edisi ini adalah mengatasi tantangan-tantangan ini dan menyiapkan Indonesia untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk mendukung pembukaan kembali ekonomi yang aman (dan berkelanjutan), sistem kesehatan yang baik perlu tetap menjadi prioritas. Seperti yang baru-baru ini terlihat di negara-negara lain, risiko percepatan tingkat infeksi atau munculnya gelombang kedua (dari COVID-19) sangat nyata, dan kepercayaan konsumen mungkin tetap rendah bahkan jika pembatasan mobilitas dihilangkan. Pembukaan kembali yang aman dan berkelanjutan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kesiapan sistem kesehatan, termasuk perluasan *testing*/pengujian dan pengawasan yang berkelanjutan.

Banyak usaha akan memerlukan dukungan untuk mengatasi krisis ekonomi. Perusahaan akan membutuhkan dukungan untuk memulai kembali produksinya secara bertahap atau memperluas produksi, dan pada saat yang sama masuknya perusahaan-perusahaan baru harus bisa difasilitasi; termasuk penanggulangan kendala investasi jangka panjang. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah ke arah yang tepat ini, terutama melalui investasi

¹ Bank Dunia (2020a).

² Ibid.

dan reformasi perdagangan yang diusulkan melalui RUU Cipta Kerja. Namun demikian, RUU tersebut juga mengusulkan reformasi yang dapat menyebabkan dampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, lingkungan dan hak-hak tenaga kerja. Terakhir, sistem keuangan yang kuat merupakan dasar dari pemulihan yang berkelanjutan, dengan prioritas terhadap kecukupan likuiditas dan pengawasan sistem keuangan.

Jutaan pekerjaan hancur selama berlangsungnya krisis ini dan ada kemungkinan peningkatan permintaan yang lebih banyak terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi. Oleh karena itu, penganggur perlu dibantu dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan keterampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja. Selain itu, memperbaiki kesenjangan yang baru diidentifikasi dalam cakupan perlindungan sosial Indonesia, membangun ekspansi berbasis COVID dalam sistem, dan mempercepat penyelesaian perawatan kesehatan universal yang didanai secara tepat untuk semua, akan membantu membangun, mempekerjakan, dan melindungi modal manusia Indonesia.

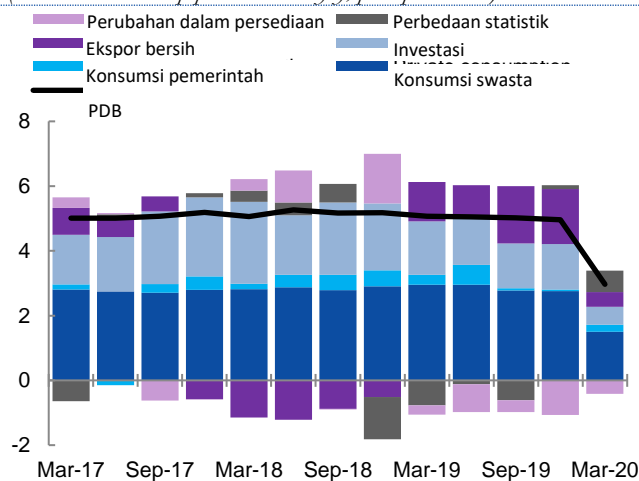
Pada saat yang sama, pemangkasan belanja modal publik dan penundaan proyek infrastruktur yang diakibatkan oleh

COVID-19 perlu ditingkatkan kembali agar tidak menghambat agenda infrastruktur pemerintah yang mendukung pertumbuhan. Upaya untuk menyegerakan partisipasi sektor swasta dalam infrastruktur juga penting, dan akan memerlukan peningkatan belanja.

Mengingat adanya kebutuhan pengeluaran dan pada saat yang sama pemerintah harus melandaikan ‘kurva utang’, kebijakan stimulus fiskal ini perlu secara bertahap dikurangi seiring dengan perlunya peningkatan penerimaan. Krisis perekonomian yang membebani kondisi fiskal ini dapat menyebabkan utang publik Indonesia meningkat pesat, dan memerlukan biaya utang yang lebih tinggi. Jika tidak terdapat reformasi dalam kebijakan peningkatan penerimaan, pada akhirnya biaya utang ini akan dapat berdampak pada belanja prioritas dan berisiko pada tingkat peringkat kredit investasi Indonesia yang telah diperoleh dengan susah payah.

Gambar ES.1: Pertumbuhan PDB menurun tajam, dengan investasi dan konsumsi swasta yang jauh lebih lemah

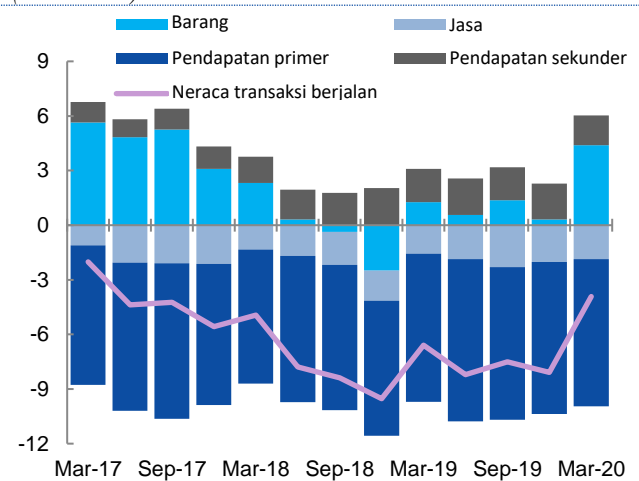
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); Perhitungan staf Bank Dunia

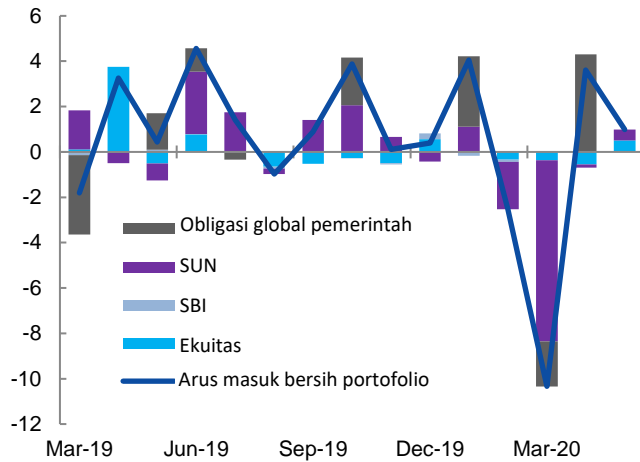
Gambar ES.2: Defisit neraca transaksi berjalan menurun di kuartal-1 seiring dengan melambatnya permintaan dalam negeri

(USD miliar)



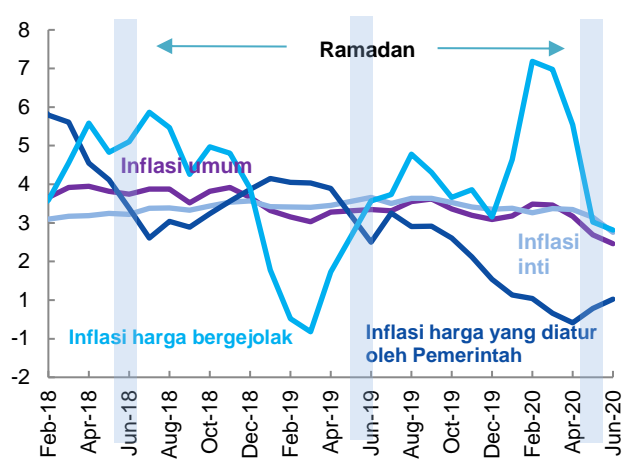
Sumber: Bank Indonesia (BI); Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.3: Terdapat arus keluar modal besar-besaran negara-negara pasar berkembang di kuartal-1 di tengah volatilitas keuangan global (USD miliar)



Sumber: Bank Indonesia (BI); Perhitungan staf Bank Dunia
 Catatan: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) adalah obligasi mata uang lokal

Gambar ES.4: Guncangan penawaran dan permintaan mempengaruhi inflasi umum di Q1 (perubahan yoy, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia